

# Kontribusi Pembelajaran Kontekstual untuk Pengembangan Kompetensi Kewarganegaraan Peserta Didik SMP di Jabar <sup>1</sup>

KOKOM KOMALASARI

<sup>2</sup> Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, FPIPS, UPI Bandung

## Abstract

This research examines the effect of contextual learning in Civic Education toward civic competence among Junior High School students in West Java. Civic competence is consisted of several variables: inter-relationship, direct experience, application, cooperation, self-regulation, and authentic assesment concepts. Employing quantitative approach, the research suggests that contextual learning in Civic Education influenced positively and significantly among 26% of respondents. The highest contribution was attributed by cooperation concept (21%), followed in second by self-regulating concept (20%).

Riset ini meneliti efek pembelajaran kontekstual dalam Pelajaran Kewarganegaraan terhadap kompetensi kewarganegaraan di antara siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Jawa Barat. Variabel kompetensi kewarganegaraan yang diteliti mencakup konsep keterkaitan, pengalaman langsung, penerapan, kerjasama, pengaturan diri, dan penilaian otentik. Menggunakan pendekatan kuantitatif, riset berhasil mendapatkan sejumlah temuan. Pertama, Pendidikan Kewarganegaraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 26% responden. Dari keseluruhan variabel, terbukti bahwa konsep kerjasama memberi pengaruh terbesar (21%) dalam memunculkan kompetensi kewarganegaraan, diikuti konsep pengaturan diri (20%).

Kata Kunci: Pembelajaran Kontekstual, Kompetensi Kewarganegaraan

## I. PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) tidak lepas dari pengaruh global. Pengaruh tersebut secara langsung berdampak pada sikap dan pola pikir peserta didik. Globalisasi menuntut Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkan *civic competence* yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) yang multidimensional.

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor *value-based education* dan mengemban misi *civic education for democraton*, sehingga pendidikan kewarganegaraan hendaknya mengkaji konsep besar yang dibawa globalisasi, yakni demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan menempatkan hukum di atas segalanya (*supremacy of law/rule of law*)

yang didasarkan pada sepuluh pilar demokrasi (*The ten pillars of Indonesian constitutional democracy*), meliputi: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) hak asasi manusia; (3) kedaulatan rakyat; (4) kecerdasan rakyat; (5) pemisahan kekuasaan negara; (6) otonomi daerah; (7) supremasi hukum (*rule of law*); (8) peradilan yang bebas; (9) kesejahteraan rakyat; dan (10) keadilan sosial. (Sanusi, 1999: 5-6).

Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berorientasi pada konsep "*contextualized multiple intelligence*" yang membuka pandangan tentang perlunya penanganan pembelajaran yang lebih kreatif, aktif-partisipatif, menggali dan mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan potensi atau kecerdasan orisinalnya, bermakna dan menyenangkan. Oleh karena itu, perlu diterapkan *contextual teaching and learning* dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Di Indonesia, saat ini pembelajaran umumnya masih menekankan pada sistem

<sup>1</sup> Artikel ini merupakan hasil penelitian.

<sup>2</sup> Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Jl. Dr. Setiabudhi 229, Bandung 40154. e-mail: komsari36@yahoo.co.id

pembelajaran konvensional dan pola pembelajaran yang menggunakan konsep "*contextualized multiple intelligence*" belum berkembang secara optimal, sehingga dalam proses pembelajaran, guru sulit menggali kemampuan peserta didik dalam menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Artinya, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tidak mengaitkan materi dengan realita kehidupan peserta didik, tidak kontekstual, lebih banyak memberikan kemampuan untuk menghafal, bukan untuk berpikir kreatif, kritis, dan analitis, bahkan menimbulkan sikap apatis dan menganggap enteng dan kurang menarik. Itulah sebabnya, guru menghadapi kesulitan mengembangkan *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions* secara komprehensif.

Oleh karena itu, perlu dikembangkan pendekatan pembelajaran kontekstual (*contextual teaching and learning*) sebagai salah satu alternatif. Pendekatan ini dianggap efektif, karena pendekatan ini memandang bahwa proses belajar benar-benar berlangsung hanya jika peserta didik dapat menemukan hubungan yang bermakna antara pemikiran yang abstrak dengan penerapan praktis dalam konteks dunia nyata.

Dalam pengalaman belajar yang demikian, fakta, konsep, prinsip, dan prosedur sebagai materi pelajaran diinternalisasikan melalui proses penemuan, penguatan, keterkaitan, dan keterpaduan (Forgarty, 1991: 1, Mathews & Cleary, 1993:2). Pembelajaran kontekstual merupakan koordinasi antara materi pelajaran (*content*) dengan keterampilan intelektual yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam suatu kondisi dan situasi yang cocok dengan psikologi kognitif peserta didik, dan kepentingan lingkungan pembelajar (Blanchard, A, 2001: 2).

Selanjutnya, Johnson (2002:25) menegaskan bahwa *contextual teaching and learning* (CTL) membantu peserta didik melihat makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya mereka.

Pendekatan pembelajaran kontekstual ini diasumsikan mampu meningkatkan kompetensi peserta didik. Komalasari dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan* (2010: 218), menegaskan bahwa "pembelajaran kontekstual merupakan salah satu wujud inovasi pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi kewarganegaraan peserta didik. Dalam pelaksanaan difusi inovasi, pembelajaran kontekstual ini masih menghadapi berbagai kendala dan resistensi, yang disebabkan berbagai faktor." Untuk itu, telah dilakukan Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi (PTBK) yang di dalamnya memuat materi tentang pendekatan pembelajaran kontekstual bagi guru-guru SMP.

Pelatihan ini diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Dirjen Pendidikan Menengah dan Dasar Depdiknas RI pada tahun 2004-2005. Keharusan penerapan pembelajaran kontekstual ini pun diteruskan dalam Kurikulum 2006 yang merupakan pengembangan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi.

Berdasarkan latar belakang pentingnya pembelajaran kontekstual dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan, maka secara umum dirumuskan, bagaimana pengaruh pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan terhadap kompetensi kewarganegaraan peserta didik SMP. Secara khusus rumusan masalah tersebut dijabarkan, apakah terdapat pengaruh signifikan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang menerapkan konsep keterkaitan (*relating*), pengalaman langsung (*experiencing*), aplikasi (*applying*), kerjasama (*cooperating*), pengaturan diri (*self-regulating*), asesmen autentik (*authentic assesment*) secara tunggal (*zero order*), parsial dan bersama-sama terhadap kompetensi kewarganegaraan peserta didik SMP.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, karena penelitian ini memiliki karakteristik metode survei, sebagaimana diungkapkan Singarimbun dan Effendi (1995: 139), yaitu: (1) sejumlah besar responden dipilih melalui prosedur sampling probabilitas untuk mewakili populasi; (2) kuesioner sistematis digunakan untuk bertanya mengenai sesuatu mengenai responden, dan mencatat jawaban-jawaban mereka; dan (3) jawaban-jawaban tersebut dikode secara numerik dan dianalisis dengan bantuan teknik statistik.

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik SMPN kelas IX di Jawa Barat, yang diajar oleh guru pendidikan kewarganegaraan yang telah mengikuti Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi (PTBK) pada tahun 2004, terdiri atas 93 SMPN yang tersebar di 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *cluster sampling*, *proportional*, dan *systematic random sampling*, sehingga diperoleh 1004 sampel peserta didik.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket skala SSHA (*Survey of Study Habits and Attitudes*) dari Brown dan Holtzman yang sudah diadakan penyesuaian dengan lingkungan budaya Indonesia untuk mengukur variabel pembelajaran kontekstual. Sedangkan untuk mengukur variabel kompetensi kewarganegaraan mengakomodasi *Civics Assessment Database* dari *National Center for Learning and Citizenship* Amerika Serikat (2006) yang disesuaikan dengan konteks Indonesia dan Kurikulum 2006 Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk mengukur variabel kompetensi kewarganegaraan digunakan tes dalam bentuk pilihan ganda (*multiple choice*), skala

bertingkat (*rating scale*), dan skala likert.

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis hubungan antarvariabel penelitian adalah analisis korelasi sederhana, parsial, dan majemuk dengan teknik analisis *Pearson Correlations*. Uji hipotesis pengaruh dilakukan dengan analisis regresi ganda, dan kontribusi dengan analisis koefisien determinasi.

## II. PEMBAHASAN

### A. Landasan Teori

#### 1. Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran kontekstual merupakan konsep pembelajaran yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, masyarakat, dan warga negara (Blanchard, 2001: 2; Berns and Erickson, 2001: 4). Dengan demikian, pembelajaran kontekstual memungkinkan peserta didik menghubungkan isi materi dengan konteks kehidupan sehari-hari untuk menemukan makna (Johnson, 2002: 24).

Pembelajaran kontekstual memiliki sejumlah karakteristik. Blanchard (2001: 5) mengemukakan karakteristik pembelajaran kontekstual meliputi:

(1) *relies on spatial memory* (bersandar pada memori mengenai ruang); (2) *typically integrated multiple subjects* (mengintegrasikan berbagai subjek materi/diisiplin); (3) *value of information is based on individual need* (nilai informasi didasarkan pada kebutuhan peserta didik); (4) *relates information with prior knowledge* (menghubungkan informasi dengan pengetahuan awal peserta didik); dan (5) *authentic assessment through practical application or solving of realistic problem* (penilaian sebenarnya melalui aplikasi praktis atau pemecahan masalah nyata).

Sedangkan menurut Bern and Erickson (2001:5-8), pembelajaran kontekstual memiliki karakteristik sebagai berikut: (a) *interdisciplinary learning*; (b) *problem-based learning*; dan (c) *external contexts for learning*." Secara lebih lengkap Johnson (2002:24) mengidentifikasi delapan komponen pembelajaran kontekstual, yaitu:

(a) *making meaningful connections* (membuat hubungan penuh makna); (b) *doing significant work* (melakukan pekerjaan penting); (c) *self-regulated learning* (belajar mengatur sendiri); (d) *collaborating* (kerjasama); (e) *critical and creative thinking* (berpikir kritis dan kreatif); (f) *nurturing the individual* (memelihara individu); (g) *reaching high standards* (mencapai

standar tinggi); dan (h) *using authentic assessment* (penggunaan penilaian sebenarnya).

Sementara itu, Sounders (1999) menyebutkan karakteristik pembelajaran kontekstual ke dalam singkatan REACT, yaitu: *relating*: belajar dalam konteks pengalaman hidup; *experiencing*: belajar dalam konteks pencarian dan penemuan; *applying*: belajar ketika pengetahuan diperkenalkan dalam konteks penggunaannya; *cooperating*: belajar melalui konteks komunikasi interpersonal dan saling berbagi; *transferring*: belajar penggunaan pengetahuan dalam suatu konteks atau situasi baru.

Pembelajaran kontekstual dalam Pendidikan Kewarganegaraan mendasarkan pada filosofi konstruktivisme, yang beranggapan bahwa pengetahuan adalah hasil konstruksi manusia. Manusia mengonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi mereka dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka. Suatu pengetahuan dianggap benar bila pengetahuan itu dapat berguna untuk menghadapi dan memecahkan persoalan atau fenomena yang sesuai (Glaserfeld, 1996: 7).

Pembelajaran kontekstual, menurut Bern and Erickson (2001: 4-9), dapat diimplementasikan melalui lima pendekatan yaitu: (1) "pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*); (2) pembelajaran koperatif (*cooperative learning*); (3) pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*); (4) pembelajaran pelayanan (*service learning*); dan (5) pembelajaran berbasis kerja (*work-based learning*)." Komalasari (2010:34) menambahkan satu pendekatan pembelajaran kontekstual lainnya, yaitu pembelajaran nilai (*value learning*).

Dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, Komalasari (2009: 156) secara khusus menyoroti penerapan pembelajaran kontekstual yang dapat dilakukan melalui Portofolio atau *We the People...Project Citizen* dari *Center for Civic Education*, Program *Law in a Free Society Series, Foundations of Democracy* oleh *Center for Civic Education*. Alternatif model lainnya adalah model yang dikembangkan program *Exercise in Participation*. Paket pembelajaran ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan partisipasi (*participatory skills*).

#### 2. Kompetensi Kewarganegaraan

Kompetensi kewarganegaraan adalah pengetahuan, nilai dan sikap, serta keterampilan peserta didik yang mendukungnya menjadi warga negara yang partisipatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Branson (1999:8-9) menegaskan:

Tujuan *civic education* adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat, baik di tingkat lokal dan

nasional. Partisipasi semacam itu memerlukan kompetensi kewarganegaraan sebagai berikut: (1) penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu; (2) pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris; (3) pengembangan karakter atau sikap mental tertentu; dan (4) komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi konstitusional.

*The National Standards for Civics and Government (Center for Civic Education, 1994)* merumuskan komponen-komponen utama *civic competences* yang merupakan tujuan *civic education* meliputi "pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak-watak kewarganegaraan (*civic dispositions*)."

Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) merupakan materi substansi yang harus diketahui warga negara. Pada prinsipnya, pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pengetahuan ini bersifat mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintah dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis serta cara-cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat global.

Berdasarkan *National Standards and Civics Framework for the 1988 National Assessment of Educational Progress (NAEP)* (Branson, 1999: 9), komponen pengetahuan kewarganegaraan ini diwujudkan dalam bentuk lima pertanyaan penting yaitu:

- (1) Apa kehidupan kewarganegaraan, politik, dan pemerintahan;
- (2) Apa fondasi-fondasi sistem politik;
- (3) Bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh konstitusi menegawantahkan tujuan-tujuan, nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi;
- (4) hubungan antara suatu negara dengan negara-negara lain dan posisinya dalam masalah-masalah internasional;
- (5) Apa peran warganegara dalam demokrasi?

Pendidikan kewarganegaraan memuat pengetahuan kewarganegaraan yang berbasis pada ilmu politik, hukum, dan kewarganegaraan. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan menyajikan fakta, konsep, generalisasi, dan teori-teori yang dikembangkan dari ilmu politik, hukum, dan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan hendaknya memerhatikan konsep-konsep kunci yang dikembangkan lebih lanjut dalam generalisasi dan teori.

Konsep-konsep kunci yang menjadi elemen inti dari pendidikan kewarganegaraan atau "*Essensial Elements of Citizenship Education*" (Qualifications and Curriculum Authority/QCA, 1998:44) sebagai berikut: (1) *democracy and authocracy*; (2)

*cooperation and conflict*; (3) *equality and diversity*; (4) *fairness justice, the rule of law, rules, laws and human right*; (5) *freedom and order*; (6) *individual and community*; (7) *power and authority*; (8) *rights and responsibility*. Sementara itu, dalam Kurikulum 2006 konsep-konsep kunci yang harus dikembangkan melalui pendidikan Kewarganegaraan meliputi persatuan dan kesatuan, norma, hukum, dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, demokrasi dan sistem politik, Pancasila, dan globalisasi.

Keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. *Civic skills* mencakup *intellectual skills* (keterampilan intelektual) dan *participation skills* (keterampilan partisipasi).

Keterampilan intelektual yang terpenting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif, dan bertanggung jawab, antara lain keterampilan berpikir kritis. *The National Standards for Civics and Government dan The Civics Framework for 1988 National Assessment of Educational Progress (NAEP)* menegaskan bahwa keterampilan berpikir kritis meliputi keterampilan mengidentifikasi, menggambarkan/mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, menentukan, dan memertahankan pendapat yang berkenaan dengan masalah-masalah publik. Sedangkan keterampilan partisipasi meliputi keterampilan berinteraksi, memantau, dan memengaruhi.

Dimensi *civic skills* ini dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berperan serta secara efektif dalam masyarakat, pengalaman berperan serta yang dirancang untuk memperkuat kesadaran berkemampuan dan berprestasi unggul dari peserta didik, dan mengembangkan pengertian tentang pentingnya peran serta aktif warga negara. Untuk dapat berperan aktif tersebut, diperlukan pengetahuan konsep fundamental, sejarah, isu dan peristiwa actual, dan fakta yang berkaitan dengan substansi dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan itu secara kontekstual, dan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan watak dari warga negara (Quigley, dkk, 1991: 39).

Watak-watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Quigley, dkk (1991: 11-14) merumuskan *civic disposition* dan karakteristiknya sebagai berikut:

*Civic disposition* adalah sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi." Secara konseptual *civic dis-*

*position* meliputi sejumlah karakteristik kepribadian, yakni *civility* (*respect and civil discourse*), *individual responsibility*, *self-discipline*, *civic-mindedness*, *open-mindedness* (*openness, skepticism, recognition of ambiguity*), *compromise* (*conflict of principles*), *compassion*, *generosity*, and *loyalty to the nation and its principles*"

Artinya, kesopanan yang mencakup penghormatan dan interaksi manusiawi, tanggung jawab individual, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, keterbukaan pikiran yang mencakup keterbukaan, skeptisisme, pengenalan terhadap kemenduaan, sikap kompromi yang mencakup prinsip-prinsip konflik dan batas-batas kompromi, toleransi pada keragaman, kesabaran dan keajekan, keharuan, kemurahan hati, dan kesetiaan terhadap bangsa dan segala prinsipnya.

Branson (1999:23) menegaskan lebih lanjut tentang pentingnya *civic disposition* dan proses pembentukannya, yaitu:

*Civic disposition* mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Watak-watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi *civil society*. Karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga tidak kalah penting. Kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan dengan sukses.

Dengan demikian, *civic disposition* sangat penting dalam pengembangan demokrasi. Pembentukan *civic disposition* merupakan suatu proses. Pendidikan merupakan salah satu wahana proses pembentukan *civic disposition* yang dapat dilakukan pada berbagai lingkungan kehidupan, baik di rumah, sekolah, masyarakat, dan organisasi.

## **B. Hasil Penelitian**

Berdasarkan data hasil analisis korelasi antar variabel X (X1, X2, X3, X4, X5, dan X6) dengan Y secara *zero order*, menunjukkan bahwa semua variabel X, pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan yang terdiri atas X1 (penerapan konsep keterkaitan); X2 (penerapan konsep pengalaman langsung); X3 (penerapan konsep aplikasi), X4 (penerapan konsep kerja sama), X5 (penerapan konsep pengaturan diri) dan X6 (penerapan konsep asesmen autentik) memiliki hubungan positif yang signifikan dengan Y (kompetensi kewarganegaraan). Koefisien korelasi keenam variabel X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 masing-masing sebesar 0.40; 0.41; 0.42; 0.46; 0.44; dan 0.43.

Secara parsial, hubungan antar-variabel X (X1, X2, X3, X4, X5, dan X6) dengan Y menunjukkan bahwa variabel X1 (penerapan konsep keterkaitan); X3 (penerapan konsep aplikasi), X4 (penerapan konsep kerja sama), X5 (penerapan konsep pengaturan diri) memiliki hubungan positif yang signifikan dengan Y (kompetensi kewarganegaraan). Koefisien korelasi keempat variabel X1, X3, X4, dan X5 tersebut masing-masing 0.09; 0.07; 0.10; 0,120. Tetapi untuk variabel X2 (penerapan konsep pengalaman langsung) dan X6 (penerapan konsep asesmen autentik) hubungan positif tidak signifikan dengan koefisien korelasi masing-masing 0,03 dan 0,05. Sedangkan secara majemuk, hubungan antar-variabel X (X1, X2, X3, X4, X5, dan X6) dengan Y menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,51.

Berdasarkan data hasil analisis regresi secara majemuk antar-variabel X (X1, X2, X3, X4, X5, dan X6) dengan Y diperoleh harga koefisien korelasi R sebesar 0.51 dengan taraf signifikansi  $0.00 < 0.05$ . Sedangkan secara *zero order*, koefisien korelasi R untuk masing-masing variabel bebas X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 secara berturut-turut 0.40, 0.41, 0.42, 0.46, 0.44, dan 0.43 dengan *t* value untuk semuanya menunjukkan  $0.00 < 0.05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen X1 (penerapan konsep keterkaitan); X2 (penerapan konsep pengalaman langsung); X3 (penerapan konsep aplikasi), X4 (penerapan konsep kerja sama), X5 (penerapan konsep pengaturan diri) dan X6 (penerapan konsep asesmen autentik) terhadap variabel dependen Y (kompetensi kewarganegaraan).

Analisis kontribusi variabel-variabel X terhadap variasi peubah Y secara majemuk, dapat dikaji dengan melihat nilai *R Square*, yaitu sebesar 0.51. Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel independen X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 untuk menjelaskan variasi pada variabel dependen Y adalah sebesar 26%, selebihnya ditentukan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model regresi ini. Selanjutnya, untuk melihat besarnya kontribusi setiap variabel X dalam menjelaskan faktor pada nilai Y, dapat dilihat persamaan garis regresi untuk nilai baku (*standardized*) dari koefisien beta. Berdasarkan data ini, persamaan regresi ganda dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = 0.11X_1 + 0.04X_2 + 0.09X_3 + 0.14X_4 + 0.16X_5 + 0.07X_6.$$

Berdasarkan hasil analisis persamaan regresi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan tingkat variabel Y (kompetensi kewarganegaraan) akan searah dengan perubahan yang terjadi pada variabel X1 (penerapan konsep keterkaitan); X2 (penerapan konsep pengalaman langsung); X3 (penerapan konsep aplikasi), X4

(penerapan konsep kerja sama), X5 (penerapan konsep pengaturan diri) dan X6 (penerapan konsep asesmen autentik).

**C. Analisis Penelitian**

Pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan memiliki korelasi positif kuat dengan kompetensi kewarganegaraan peserta didik SMP di Jawa Barat, yaitu sebesar 0.51. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan berpengaruh sebesar 26% terhadap kompetensi kewarganegaraan. Selebihnya, yaitu 74%, dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti.

Pada gambar 1 menjelaskan besaran kontribusi pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan terhadap kompetensi kewarganegaraan peserta didik SMP.

Kuatnya hubungan antara pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan dengan kompetensi kewarganegaraan dapat dianalisis dari beberapa hal:

*Pertama*, pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan bersifat alamiah bagi peserta didik. Artinya, mengajak peserta didik untuk bertindak dengan cara yang alami bagi manusia, yaitu sesuai dengan cara otak berfungsi. Pembelajaran kontekstual merangsang otak untuk mengkonstruksi pola-pola pengetahuan melalui keterkaitan dengan konteks realita kehidupan peserta didik.

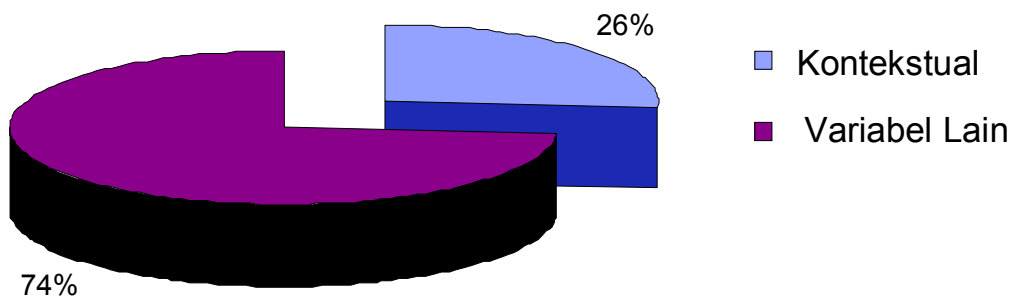
*Kedua*, pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan membelajarkan prinsip hidup warga negara. Peserta didik dihargai sebagai makhluk individual, makhluk sosial dan sebagai warga negara. Sebagai konsekuensi dari kodrat dan posisinya tersebut, maka peserta didik memiliki sifat saling ketergantungan, diferensiasi, dan memiliki hak mengatur diri. Ketiga hal tersebut

menjadi prinsip pembelajaran kontekstual (Johnson, 2002).

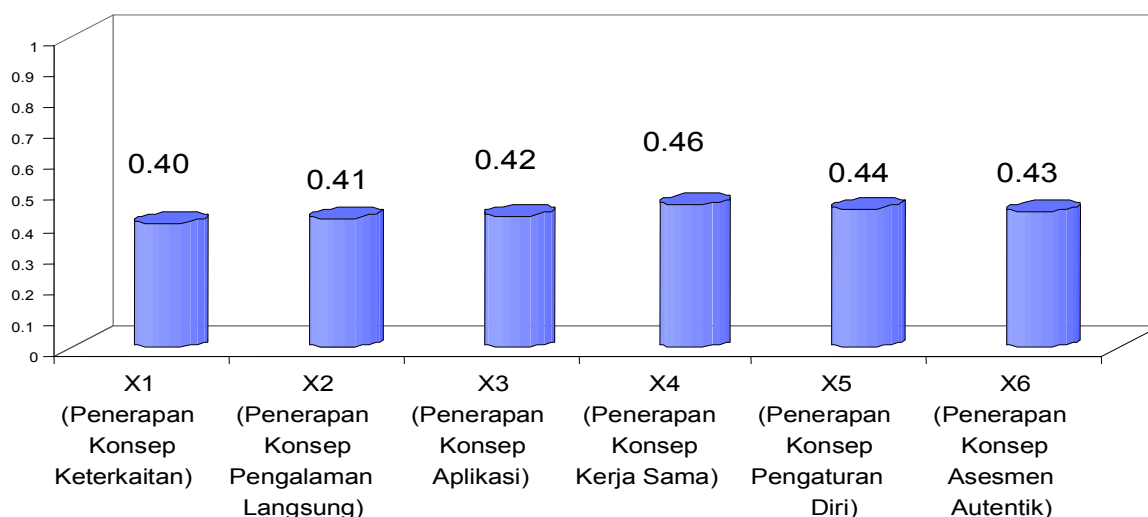
*Ketiga*, pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan mendukung penciptaan *democratic learning*. Artinya, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana pembelajaran demokrasi dalam rangka mengembangkan peserta didik menjadi warga negara demokratis yang cerdas, bertanggung jawab, dan partisipatif. Prinsip-prinsip demokrasi dimasukkan dalam *content* sekaligus diterapkan dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan bersinergi dengan kegiatan pembiasaan dan ekstrakurikuler di sekolah.

Dalam Pembelajaran kontekstual sebagai *democratic learning* diadopsi beberapa model yang dirangkum Bern and Erickson (2001) sebagai berikut: (1) pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*); (2) *cooperative learning* (pembelajaran kooperatif); (3) pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*); (4) pembelajaran pelayanan (*service learning*).

Jika dilihat masing-masing komponen pembelajaran kontekstual, maka masing-masing komponen memiliki besaran hubungan dan pengaruh yang bervariasi terhadap kompetensi kewarganegaraan. Dilihat dari besaran koefisien korelasi secara tunggal (*zero order*), maka penerapan konsep kerja sama memiliki koefisien korelasi paling besar, yaitu 0,46, disusul dengan penerapan konsep pengaturan diri 0,44, asesmen autentik 0,43, penerapan konsep aplikasi 0,42, penerapan konsep pengalaman langsung 0,41, dan penerapan konsep keterkaitan 0,40. Dengan demikian semua komponen pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan memiliki hubungan positif kuat dengan kompetensi kewarganegaraan. Perbandingan besaran koefisien korelasi masing-masing komponen Pembelajaran



Gambar 1  
*Pengaruh Pembelajaran kontekstual dalam Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Kompetensi Kewarganegaraan (Komalasari, 2009: 114)*



Gambar 2

Besaran Koefisien Korelasi Komponen pembelajaran kontekstual dalam Pendidikan Kewarganegaraan secara tunggal terhadap Kompetensi Kewarganegaraan (Komalasari, 1999:209)

kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan dapat dilihat pada gambar 2.

Jika dilihat secara parsial, maka penerapan konsep kerja sama paling tinggi kontribusinya, disusul penerapan konsep pengaturan diri, keterkaitan, dan aplikasi. Konsep pengalaman langsung dan asesmen autentik kecil kontribusinya bahkan tidak signifikan.

Simpulan hasil penelitian tersebut dapat dianalisis dalam uraian berikut:

*Pertama, cooperating* dan *self-regulation* memiliki kontribusi terpenting terhadap Kompetensi Kewarganegaraan. Tugas-tugas belajar yang kompleks seperti pemecahan masalah, berpikir kritis dan pembelajaran konseptual meningkat secara nyata pada waktu digunakan strategi-strategi kooperatif. Metode *cooperative learning* memanfaatkan kecenderungan peserta didik untuk berinteraksi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa di dalam *setting* kelas *cooperative learning*, peserta didik belajar lebih banyak dari satu teman ke teman sebagai tutor sebaya (Stahl, 2000).

Pembelajaran kontekstual pun mengembangkan *self-regulated learning* dari Zimmerman (1989) yang dicirikan oleh: (1) peserta didik diasumsikan memiliki kesadaran diri atas potensi yang dimiliki dan dapat menggunakan secara baik dalam proses pengaturan diri untuk mencapai hasil belajar yang optimal; (2) peserta didik memiliki orientasi diri terhadap siklus umpan balik dan refleksi selama proses belajar berlangsung. Dalam siklus umpan balik dan refleksi tersebut, peserta didik memonitor derajat efektivitas metode belajar dan respons-respons yang dilakukan untuk mencapai hasil belajar melalui

berbagai cara yang senantiasa diperbaiki (Zimmerman, 1989). *Self-regulated learning* ini merupakan suatu terminologi yang membuka wacana baru tentang faktor-faktor determinan keberhasilan peserta didik dalam belajar. Konsep tentang *self-regulated learning* telah merubah perspektif fokus analisis keberhasilan belajar dari kemampuan belajar peserta didik atau potensi belajar peserta didik dan lingkungan belajar di sekolah atau di rumah sebagai suatu entitas yang "fixed"; kini digantikan oleh kesanggupan peserta didik secara personal untuk merancang sendiri strategi belajar dalam upaya meningkatkan pencapaian hasil belajar dan kesanggupannya untuk mengelola lingkungan yang kondusif untuk belajar.

*Kedua*, keterkaitan (*relating*) dan aplikasi (*applying*) mutlak diterapkan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sesuai dengan jati diri pendidikan kewarganegaraan.

*Ketiga*, pengalaman langsung (*experiencing*) dalam implementasinya dihadapkan pada masalah resistensi terhadap inovasi pembelajaran sebagaimana dikemukakan Quigley (2000), yaitu: resistensi dari generasi tua, termasuk guru yang melanjutkan kepercayaan dan praktik budaya politik otoriter dalam pembelajaran; perubahan yang lambat dalam kelembagaan di sekolah; tidak berfungsinya desentralisasi pengambilan keputusan untuk mengembangkan desain pembelajaran dan implementasi program kurikulum; resistensi terhadap gaya mengajar yang demokratis dan pemberdayaan peserta didik; kurangnya pelatihan bagi guru pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan kelas sebagai laboratorium demokrasi; berhadapan dengan keanekaragaman

dan kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

*Ketiga*, Asesmen autentik (*authentic assessment*) dalam implementasinya masih perlu diperbaiki, karena dihadapkan pada keterbatasan kemampuan teoritis dan praktis, sebagaimana dikemukakan oleh Gronlund (1981: 153) bahwa sekalipun asesmen autentik itu amat penting, namun berdasarkan hasil observasi di lapangan para guru merasa kesulitan, karena belum memahami prosedur penggunaannya.

### III. PENUTUP

Tulisan ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan berpengaruh signifikan terhadap kompetensi kewarganegaraan peserta didik SMP di Jawa Barat. Hal ini karena pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan menerapkan teori belajar konstruktivistik yang bersifat alamiah bagi peserta didik, di mana kompetensi kewarganegaraan dibangun dalam diri seorang individu melalui proses interaksi yang berkesinambungan antara pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan.

*Kedua*, kontribusi masing-masing faktor pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan terhadap kompetensi kewarganegaraan peserta didik SMP di Jawa Barat bervariasi. Diantara keenam faktor pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan, faktor kerja sama memberikan kontribusi terbesar disusul dengan faktor pengaturan diri, keterkaitan dan aplikasi.

*Ketiga*, penerapan konsep kerja sama dan pengaturan diri dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai faktor penting untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan, karena berisi prinsip-prinsip penghargaan terhadap sosok warga negara yang utuh sebagai makhluk sosial dan sekaligus makhluk individual, yang memiliki: (1) prinsip kesaling-tergantungan; (2) prinsip diferensiasi; dan (3) prinsip pengaturan diri. Tiga prinsip tersebut menyiratkan perlunya kerjasama dan sekaligus kemandirian pada diri peserta didik dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.

*Keempat*, penerapan konsep keterkaitan dan konsep aplikasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan hal yang mutlak dilakukan karena paradigma baru pendidikan kewarganegaraan menuntut digunakannya pendekatan multidisipliner, merefleksikan kenyataan di masyarakat; memerlakukan kelas sebagai laboratorium demokrasi; menghargai kontribusi masyarakat dalam pembelajaran, dan melibatkan peserta didik dalam masyarakat.

*Kelima*, konsep pengalaman langsung yang

dipraktikkan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, idealnya meliputi kegiatan peserta didik dalam eksplorasi, penemuan, investigasi, dan penelitian langsung ke lapangan. Tetapi, dalam realita pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala. Pengomunikasian konsep dan praktik pengalaman langsung belum optimal dilakukan baik melalui saluran interpersonal maupun media massa. Tidak semua guru memiliki kecepatan yang sama dalam menerapkan konsep pengalaman langsung. Hal ini terkait dengan sulitnya merubah budaya belajar-mengajar.

*Keenam*, sekalipun asesmen autentik itu amat penting, namun belum optimal dilaksanakan guru. Guru kesulitan dalam melaksanakan penilaian pendidikan kewarganegaraan, karena kompleksnya kompetensi yang harus dinilai (*civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions*). Guru masih memiliki keterbatasan pengetahuan dalam jenis, teknik, instrumen, dan prosedur penggunaan penilaian pendidikan kewarganegaraan untuk menilai masing-masing kompetensi tersebut secara tepat.

Tulisan ini merekomendasikan beberapa hal, sebagai berikut: (1) Kementerian Pendidikan Nasional hendaknya memiliki komitmen kuat untuk memperbaiki mutu pendidikan dalam keseluruhan sistemnya secara komprehensif dan sinergis (pembelajaran, kurikulum, fasilitas pembelajaran, dana pendidikan, pelatihan guru, komite sekolah, manajemen sekolah, monitoring, supervisi, dan evaluasi mutu pembelajaran di sekolah); (2) Kementerian Pendidikan Nasional hendaknya bekerja sama dengan LPTK dan sekolah mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan *contextual teaching and learning* bagi guru, ditindaklanjuti dengan praktek di kelas yang dipantau dan dievaluasi, serta penelitian tindakan kelas; (3) pengelola pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi hendaknya mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan berbagai inovasi model pembelajaran dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran dengan melibatkan guru di dalamnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Berns, Robert G. and Erickson, Patricia M. (2001). *Contextual Teaching and Learning The Highlight Zone: Reserach @ Work No. 5*. (<http://www.nccte.org/publications/infosynthesis/highlightzone/highlight05/index.asp> diunduh pada 26 Mei 2004.
- Blanchard, A. (2001). *Contextual Teaching and Learning*. (<http://www.horizonshelp.org/contextual/contextual.htm> - 8k) diunduh pada 26 Mei 2006.
- Branson, M.S. (1999). *Making the Case for Civic Education: Where We Stand at the End of the*



- 20<sup>th</sup> Century. Calabasas: Center for Civic Education.
- Center for Civic Education/CCE. (1994). *Civitas: National Standards for Civics and Government*. Calabasas: Center for Civic Education
- Forgarty, R. (1991), *How to Integrate the Curricula*. Illinois: Skylight.
- Glasserfeld, E. (1996). "Introduction: Aspects of Constructivism", in: Fosnot, C (ed). *Constructivisme: Theory, Perspectives, and Practice*. Teachers College, pp 193-202.
- Gronlund, N.E. (1981). *Measurement and evaluation in teaching*. 4th Edition. New York: Macmillan Publishing.
- Johnson, E. B. (2002). *Contextual Teaching and Learning: What It Is and Why It Is Here to Stay*. California USA : Corwin Press. Inc.
- Komalasari, K. (2009). "Pengaruh Pembelajaran Kontekstual dalam Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Kompetensi Kewarganegaraan Peserta didik SMP," *Disertasi*, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Komalasari, K. (2010). *Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Komalasari, K. (2010). "Difusi Inovasi Pembelajaran Kontekstual dalam Pendidikan Kewarganegaraan". *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol 17, No 3, pp.218-224.
- Mathews, B. & Cleary,P. (1993). *Integrated Curriculum in Use: Practical Ideas for Planning and Assessment*. Melbourne: Ashton Scholastic Pty Limited.
- National Center for Learning and Citizenship/NCLC. (2006). *Resources to Assess Student Civic Competencies and School Climate*. (<http://www.nclc.org/>) diunduh pada 30 Maret 2007.
- Quigley, C.N., Buchanan, Jr.J.H., Bahmueller, C.F. (1991). *Civitas: A Framework for Civic Education*. Calabasas: Center for Civic Education.
- Quigley, C.N. (2000). "Global Trend in Civic Education: International Seminar about The Need for New Indonesian Civic Education," 29 Maret 2000. Bandung.
- Qualifications and Curriculum Authority/QCA. (1998). *Education for Citizenship and the Teaching of Democracy in Schools*. London: Departemen of Education and Employment-DIEE.
- Sanusi, A. (1999). *Model Pendidikan Kewarganegaraan Menghadapi Perubahan dan Gejala Sosial*. Bandung: Center for Indonesia Civic Education.
- Singarimbun, M. dan Effendi, S. (1995). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sounders. (1999). *Contextually Based Learning: Fad or Proven Practice*, ([http://www.horizonshelp.org/contextual/\\_fb070999.htm](http://www.horizonshelp.org/contextual/_fb070999.htm)) diunduh pada 16 Juni 2003.
- Stahl, E. (2000). *A Programatic Evaluation of CIVITAS: An International Civic Education Exchange Program 1999-2000*. LBJ School of Public Affairs, The University of Texas.
- Zimmerman. (1989). *Self-regulated Learning and Academic Achievement: Theory, Research, and Practice*. London: Spring Verlag Inc.

# Formulir Berlangganan MIMBAR

Saya ingin berlangganan untuk (lingkari yang diperlukan):

## Edisi sekarang dan sebelumnya

- Volume XXIII Nomor 1 - 2007
- Volume XXIII Nomor 2 - 2007
- Volume XXIV Nomor 1 - 2008
- Volume XXIV Nomor 2 - 2008
- Volume XXV Nomor 1 - 2009
- Volume XXV Nomor 2 - 2009
- Volume XXVI Nomor 1 - 2010
- Volume XXVI Nomor 2 - 2010
- Volume XXVII Nomor 1 - 2011

## Jumlah eksemplar

..... eksemplar.  
..... eksemplar.  
..... eksemplar.  
..... eksemplar.  
..... eksemplar.  
..... eksemplar.  
..... eksemplar.  
..... eksemplar.  
..... eksemplar.

## Edisi selanjutnya

- Selama satu tahun
- Selama dua tahun
- Selama tiga tahun

## Jumlah eksemplar

..... eksemplar  
..... eksemplar  
..... eksemplar

## Pembayaran dilakukan melalui: (lingkari salah satu)

- Transfer (Fotokopi bukti transfer dilampirkan bersama Formulir ini)  
Rekening : Bank **BRI Syariah** No. **1002945726**.  
Atas nama : Yuliani qq Dikdik M.Sodik
- Wesel Pos  
Tanggal pengiriman uang .....

## Data Pelanggan

**Nama** : .....

**Alamat** : .....

**Telp/HP/faks** : .....

**E-mail** : .....

## Keterangan:

- Harga langganan per eksemplar Rp 70.000,00 (sudah termasuk ongkos kirim).
- Jurnal MIMBAR terbit dua kali dalam setahun.
- Bila telah diisi lengkap, mohon Formulir ini dimasukkan amplop beserta bukti pembayaran dan dikirimkan ke alamat Jurnal Sosial dan Pembangunan MIMBAR.. Jl. Tamansari No. 20 Bandung 40116, Telp. (022) 4203368, Pes. 153, 154, 155 Faks. (022) 4263895. e-mail: mimbar.unisba@yahoo.com.
- Permohonan langganan dapat juga dilakukan via pos, e-mail, atau telepon.

Tanda Tangan Pelanggan

---